



**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
KUNJUNGAN PADAT KARYA**

2021

**KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
DIREKTORAT JENDERAL SUMBER DAYA AIR**

Jl. Pattimura 20/7 Kebayoran Baru
Jakarta Selatan

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR KUNJUNGAN PADAT KARYA

1. Ruang Lingkup

Ruang lingkup SOP ini terdiri dari persiapan saat hari kunjungan (kelengkapan di lapangan, data teknis pada panel informasi, P3A dan format kunjungan lapangan)

2. Tujuan

Tujuan dari SOP ini adalah:

- 1) Sebagai pedoman dan arahan kepada BBWS/BWS dalam pelaksanaan kegiatan kunjungan padat karya;
- 2) Sebagai pedoman koordinasi dan pembagian tugas, tanggung jawab dan wewenang stakeholder dalam pelaksanaan kegiatan kunjungan padat karya;

3. Ringkasan

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) terus mempercepat penyaluran Program Padat Karya Tunai (PKT/cash for work) guna mengurangi angka pengangguran di tengah ketidakpastian perekonomian pada masa Pandemi COVID-19. Selain mengalokasikan anggaran program PKT rutin tahun 2020 sebesar Rp 11,44 triliun dengan target penerima manfaat 613.513 orang, Kementerian PUPR juga melakukan perubahan skema pada program atau kegiatan infrastruktur yang semula bersifat reguler menjadi dilaksanakan dengan pola Padat Karya dengan alokasi anggaran Rp 654,4 miliar dan target penerima manfaat sebanyak 80.888 orang.

Tercatat hingga pertengahan Juni 2020, seluruh program PKT Kementerian PUPR baik yang rutin maupun program reguler dengan pola padat karya telah menyerap tenaga kerja sebanyak 144.163 orang dengan total anggaran yang telah disalurkan sebesar Rp 2,16 triliun atau sebesar 17,9% dari total alokasi sebesar Rp 12,01 triliun.

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan Program PKT Kementerian PUPR dilaksanakan melalui pembangunan infrastruktur yang melibatkan masyarakat/warga setempat sebagai pelaku pembangunan, khususnya infrastruktur berskala kecil atau pekerjaan sederhana yang tidak membutuhkan teknologi. Tujuan utama Padat Karya untuk mempertahankan daya beli masyarakat di perdesaan atau mendistribusikan dana pembangunan ke desa-desa.

Anggaran program padat karya utamanya digunakan untuk Program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi (P3TGAI), Pemeliharaan Rutin Jalan & Jembatan, Pengembangan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah (PISEW), penataan Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU), Tempat Pengelolaan Sampah Reduce, Reuse, Recycle (TPS 3R), Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Pamsimas) dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Sanimas), Pembangunan Baru dan Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya.

4. Definisi

- a. **Direktorat Bina Operasi dan Pemeliharaan**, adalah unit organisasi dibawah Direktorat Jenderal Sumber Daya Air yang mempunyai tugas melaksanakan pembinaan pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pembinaan operasi dan pemeliharaan serta pembinaan persiapan dan fasilitasi penanganan bencana.
- b. **Subdirektorat Perencanaan Teknis dan Kelembagaan**, adalah unit organisasi dibawah Direktorat Bina Operasi dan Pemeliharaan Direktorat Jenderal Sumber Daya Air yang mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, program, dan anggaran di bidang operasi dan pemeliharaan, penyiapan pembinaan pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria kelembagaan dan pemanfaatan sumber daya air,

pembinaan penyusunan rencana penyediaan air prediktif dan pelaksanaan verifikasi alokasi air, pelaksanaan fasilitasi, koordinasi pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penanganan dan penanggulangan bencana, pengelolaan peralatan, serta penyusunan laporan kinerja direktorat jenderal.

- c. **Subdirektorat Wilayah** adalah unit organisasi dibawah Direktorat Bina Operasi dan Pemeliharaan Direktorat Jenderal Sumber Daya Air yang melaksanakan penyiapan pembinaan pelaksanaan norma, standar, prosedur, kriteria, pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang operasi dan pemeliharaan sungai dan pantai, drainase utama perkotaan, irigasi dan permukaan, bendungan, danau, situ, embung, air tanah, dan air baku, penyusunan rekomendasi teknis perizinan penggunaan dan pengusahaan sumber daya air serta pengalihan alur sungai, pemberdayaan penyidik pegawai negeri sipil bidang sumber daya air, pembinaan pemberdayaan masyarakat, fasilitasi pengembangan dan peningkatan tata guna air irigasi dan gerakan penyelamatan air, fasilitasi pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi penanganan bencana, audit kondisi sarana dan prasarana sumber daya air yang rusak akibat bencana, serta penyusunan informasi penanggulangan bencana. Subdirektorat wilayah dibagi menjadi Subdirektorat Wilayah I untuk wilayah Pulau Sumatera dan Pulau Kalimantan, Subdirektorat Wilayah II untuk wilayah Pulau Jawa, Pulau Bali, dan Kepulauan Nusa Tenggara dan Subdirektorat Wilayah III untuk wilayah Pulau Sulawesi, Kepulauan Maluku dan Pulau Papua.
- d. **Padat Karya Tunai** merupakan kegiatan pemberdayaan masyarakat desa khususnya yang miskin dan marginal yang bersifat produktif dengan mengutamakan pemanfaatan sumber daya, tenaga kerja, dan teknologi lokal untuk memberikan tambahan upah/ pendapatan, meningkatkan daya beli, mengurangi kemiskinan, dan sekaligus mendukung penurunan angka stunting.
- e. **Program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi** yang selanjutnya disebut P3-TGAI adalah program rehabilitasi, peningkatan, atau pembangunan Jaringan Irigasi dengan berbasis peran serta masyarakat petani yang dilaksanakan sendiri oleh Perkumpulan Petani Pemakai Air, Gabungan Perkumpulan Petani Pemakai Air atau Induk Perkumpulan Petani Pemakai Air secara swakelola.
- f. **Padat Karya P3-TGAI** adalah kegiatan pemberdayaan masyarakat desa dengan mengutamakan pemanfaatan sumber daya, tenaga kerja, dan teknologi lokal pada program rehabilitasi, peningkatan, atau pembangunan Jaringan Irigasi dengan berbasis peran serta masyarakat petani yang dilaksanakan sendiri oleh Perkumpulan Petani Pemakai Air, Gabungan Perkumpulan Petani Pemakai Air atau Induk Perkumpulan Petani Pemakai Air secara swakelola.



**KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
DIREKTORAT JENDERAL SUMBER DAYA AIR**

NOMOR SOP	90/SOP-DJSDA/2021
TANGGAL PEMBUATAN	
TANGGAL REVISI	
DISUSUN OLEH	Direktorat Bina Operasi dan Pemeliharaan
DISETUJUI OLEH	Direktur Jenderal Sumber Daya Air
	ttd Ir. Jarot Widyoko, Sp-1 (NIP. 19630224 198810 1 001)
NAMA SOP	KUNJUNGAN PADAT KARYA

DASAR HUKUM

1. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2020 tentang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 40)
2. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14/PRT/M/2015 tentang Kriteria dan Penetapan Status Daerah Irigasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 638);
3. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 30/PRT/M/2015 tentang Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 869);
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah Pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1340) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 173/PMK.05/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 Tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah Pada Kementerian Negara/ Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1745);
5. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 03/PRT/M/2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 96);
6. Surat Edaran Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 06/SE/M/2020 tentang Penanganan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
7. Instruksi Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 02/IN/M/2020 tentang Protokol Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Dalam Penyelenggaraan Jasa Konstruksi;
8. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 26 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Nomor 16 Tahun 2020 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Di Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat;
9. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 4 tahun 2021 tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi;


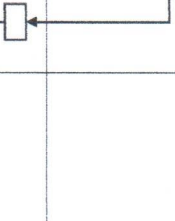

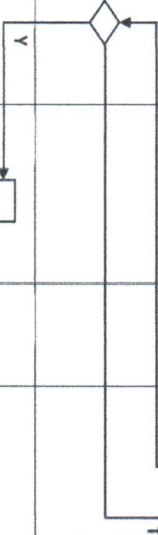




KUALIFIKASI PELAKSANA

1. Memahami Peraturan Perundangan terkait padat karya;
2. Mampu memahami pengelolaan sumber daya air;
3. Mampu melaksanakan proses pelaksanaan kunjungan padat karya;
4. Mampu melaksanakan evaluasi terhadap kegiatan padat karya;



2

KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Data-data pendukung 2. Komputer/printer/scanner/ATK 3. Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDAFTARAN
<p>Apabila SOP ini tidak dilaksanakan, maka tidak terlaksananya kegiatan kunjungan padat karya</p>	<p>Di simpan dalam bentuk data elektronik dan data manual</p>

BAGAN ALIR
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
KUNJUNGAN PADAT KARYA

NO	KEGIATAN	PELAKSANA					WAKTU BAKU		KET.	
		BIRO KOMPU	KANTOR SEKRETARIAT KEPRESIDENAN	DITJEN SDA	DIREKTORAT BINA OP	BBWS/BWS	KELENGKAPAN	OUTPUT		
1	Biro Kompu Kementerian PUPR menerima usulan kunjungan Presiden dari Ditjen SDA dengan prioritas lokasi						Surat Usulan	1	Surat	Prioritas Lokasi : 1. Dilwati jalur kunjungan presiden 2. Berdasarkan dengan bandara / exit toll / Jalan Nasional dan Jalan Provinsi 3. Melibatkan beberapa kelompok P3A/GP3A 4. Memiliki hamparan sawah yang cukup luas 5. Berdekatan dengan kegiatan padat karya lainnya
2	Ditjen SDA menerima hasil keputusan dari Biro Kompu Kementerian PUPR dan mendelgasikan kepada Direktur Bina OP						Surat	15 menit	Disposisi	
3	Direktorat Bina OP dan BBWS/BWS yang dikunjungi melakukan inventarisasi lokasi P3TGAJ, survey awal, dan menyampaikan hasil keputusan persetujuan usulan lokasi kepada Biro Kompu Kementerian PUPR						Disposisi	3	Surat	
4	Biro Kompu mengkaji usulan lokasi kunjungan dari Ditjen SDA dan menyampaikan usulan ke kantor Sekretariat Presiden (T) Jika tidak sesuai, meminta perbaikan (Y) Jika sesuai, lanjut ke kegiatan 5						Surat Usulan	2	Surat	
5	Kantor Sekretariat Presiden menerima usulan lokasi dan menyampaikan hasil keputusan persetujuan usulan lokasi						Surat Usulan	1	Surat	
6	Biro Kompu menerima dan menyampaikan hasil keputusan persetujuan lokasi kepada Ditjen SDA melalui Dit. Bina OP						Surat	2	Surat	
7	Ditjen SDA menerima hasil keputusan dari Biro Kompu Kementerian PUPR dan mendelgasikan kepada Direktorat Bina OP						Surat	15 Menit	Disposisi	
8	Direktorat Bina OP Bersama dengan BBWS/BWS, SKPD TP-OP, dan Protokol Presiden melakukan survey lokasi dan penentuan akhir lokasi kunjungan presiden						Disposisi	3	Berita Acara	
9	BBWS/BWS menyiapkan data teknis DI, berkoordinasi dengan Biro Kompu dan Paspampres, mencetak banner dan pamflet berisi data teknis yang sudah disiapkan, melaksanakan proses kunjungan presiden pada hari kedatangan, koordinasi dengan Kepala Desa untuk menyiapkan peralatan protocol pencegahan COVID-19, dan menghubungi petugas Kesehatan untuk keperluan rapid test pekerja						Berita Acara	2	Laporan	

Keterangan Simbol:

 Kegiatan mulai dan berakhir
 Proses atau kegiatan eksekusi

 Kegiatan Pengambilan Keputusan
 Arah Proses Kegiatan



Hubungan antar simbol yang berbeda halaman

✓

LAMPIRAN

I. Persiapan Saat Hari Kunjungan

A. Kelengkapan di Lapangan

1. Kebutuhan di lapangan berupa panel ukuran 1,2 m x 2,4 m, sepatu boots, payung, jas hujan, leaflet dan kursi kayu panjang (bila dibutuhkan)
2. Bahan material berupa pasir, batu, dan semen
3. Peralatan kerja
4. Peralatan protokol pencegahan COVID-19 berupa hand sanitizer, masker, dan fasilitas pencucian tangan

B. Data Teknis Pada Panel Informasi

Panel informasi berfungsi sebagai papan informasi pelaksanaan kegiatan padat karya, berukuran 1,2 m x 2,4 m. Terdapat 2 panel informasi yang terdapat pada lokasi kunjungan, jika hanya 1 panel yang dipasang maka diutamakan panel 1 yang telah diupdate. Data teknis yang termuat pada panel informasi sebagai berikut:

1. Progress Padat Karya PUPR status terupdate dilengkapi foto
2. Progress padat karya Ditjen SDA status terupdate dilengkapi foto
3. Jumlah lokasi padat karya di Provinsi lokasi kunjungan
4. Peta lokasi sebaran di Provinsi kunjungan
5. Nama Desa, Kecamatan, Kabupaten, dan Daerah Irigasi
6. Jumlah tenaga kerja, dan lama waktu pelaksanaan
7. Jenis pekerjaan yang dilakukan
8. Dokumentasi padat karya di lokasi lainnya dalam satu provinsi
9. Jumlah kaum gender dan tenaga kerja berdampak Covid-19 (TKI, buruh/pekerja yang di-PHK)
10. Gambar desain
11. Foto-foto Padat Karya PUPR lainnya

C. P3A

1. P3A Melaksanakan Rapid Test
2. P3A Melaksanakan pekerjaan rehab saluran irigasi tersier tetap menjaga protokol Covid-19
3. Mengawasi jalannya pekerjaan melalui TPM dan KMB

II. Format Pelaporan Kunjungan Presiden P3-TGAI

Pelaporan kunjungan Presiden dilakukan setelah kegiatan kunjungan Presiden ke lokasi P3-TGAI selesai dilaksanakan dengan format pelaporan sebagai berikut:

A. Slide 1 – Peta Lokasi Kunjungan

Slide ini berisi peta perjalanan kunjungan Presiden. Memuat titik-titik lokasi yang akan dikunjungi seperti:

1. Bandara tempat presiden mendarat/Exit Toll/Landmark Kota (Alun-alun, Kantor Gubernur/Bupati)
2. Lokasi kunjungan utama (Peresmian Bendungan, jalan tol, dan sebagainya)
3. Plotting lokasi P3-TGAI
4. Data-data yang ditampilkan berupa Jarak waktu tempuh antara lokasi kunjungan, dokumentasi kondisi jalan dan koordinat lokasi P3-TGAI.

B. Slide 2 – Data Teknis Lokasi P3-TGAI

1. Nama daerah irigasi

2. *Output*
3. *Outcome*
4. Nama P3A/GP3A/IP3A
5. Tahun Berdiri P3A/GP3A/IP3A
6. Luas Wilayah Daerah Irigasi
7. Hasil Panen
8. Jumlah Penerima Manfaat
9. Waktu Pelaksanaan
10. Penyerapan Tenaga Kerja
11. Tenaga Kerja Terdampak Covid-19
12. Upah Tenaga Kerja
13. Sketsa penampang melintang saluran
14. Sketsa trase saluran saluran yang akan dikerjakan dilengkapi dengan keterangan panjangnya

Jika ada 2 usulan lokasi kunjungan, maka perlu dibuat 1 slide tambahan untuk peta keseluruhan kunjungan (Total 5 slide).